

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara  $109^{\circ} 47' 28''$  -  $110^{\circ} 8' 20''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 32' - 7^{\circ} 54''$  Lintang Selatan. Luas daerah adalah 1.034,82  $\text{km}^2$  yang terdiri dari  $\pm 2/5$  daerah dataran dan  $3/5$  daerah pegunungan dengan batas-batas wilayah adalah :

Tabel 3

Batas Wilayah Kabupaten Purworejo

Sebelah utara	:	Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
Sebelah timur	:	Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY
Sebelah selatan	:	Samudra Indonesia
Sebelah barat	:	Kabupaten Kebumen

Secara administratif, Kabupaten Purworejo meliputi 16 kecamatan yang terdiri dari 469 desa dan 25 kelurahan. Dari enam belas kecamatan di Kabupaten Purworejo, kecamatan terjauh adalah Kecamatan Bruno dengan jarak 35 km dari pusat kota, dan kecamatan terdekat dari Purworejo adalah

Kecamatan Banyuurip dengan jarak dari pusat kota 4 km. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo telah terjangkau angkutan umum.

Adapun jumlah desa dan luas menurut kecamatan adalah sebagai berikut :

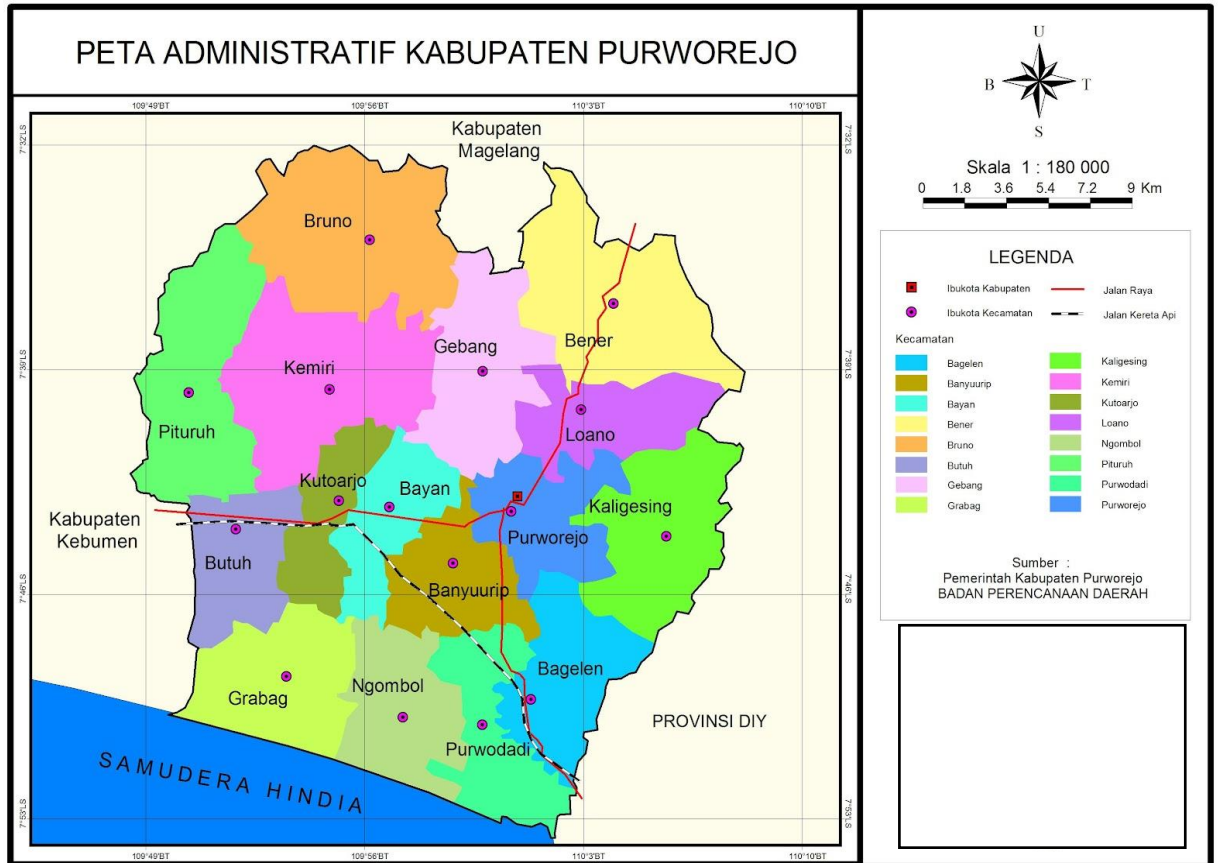
Tabel 4

Jumlah Desa dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Grabag	32	64,92
2.	Ngombol	57	55,27
3.	Purwodadi	40	53,96
4.	Bagelen	17	63,76
5.	Kaligesing	21	74,73
6.	Purworejo	25	52,72
7.	Banyuurip	27	45,08
8.	Bayan	26	43,21
9.	Kutoarjo	27	37,59
10.	Butuh	41	46,08
11.	Pituruh	49	77,42
12.	Kemiri	40	92,05
13.	Bruno	18	108,43
14.	Gebang	25	71,86
15.	Loano	21	53,65
16.	Bener	28	94,08
	Jumlah	494	1.034,82

*Sumber Data : Purworejo Dalam Angka Tahun 2009*

Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Purworejo



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Purworejo

Keadaan rupa bumi (topografi) daerah Kabupaten Purworejo secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.

2. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1050 meter di atas permukaan air laut.

Secara umum Kabupaten Purworejo mempunyai iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang datang setiap enam bulan silih berganti. Suhu rata-rata 20<sup>0</sup>C – 32<sup>0</sup>C. Sedangkan kelembaban rata-rata antara 70 – 90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 9.291 mm, diikuti bulan Januari sebesar 7.849 mm.

Selain itu pasca desentralisasi di Kabupaten Purworejo, Prinsip desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui UU No.32/2004, pemerintah daerah dan masyarakat di

daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level kabupaten/kota dirasakan sudah cukup tepat dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Purworejo sendiri, kini mulai mengembangkan pariwisata dan aset daerah, Kabupaten Purworejo termasuk Kabupaten dengan tempat pariwisata yang beragam dimulai dari pegunungan hingga hamparan kebun teh dan juga memiliki garis pantai yang panjang dari pantai Jatikontal hingga pantai ketawang. Selain itu kini dengan dibangunnya Bandara Internasional di daerah Kulon Progo sehingga kini banyak investor-investor datang untuk mengembangkan usaha ataupun membangun usaha baru di Kabupaten Purworejo.

Selain itu masalah politik di Kabupaten ini juga cukup menarik seperti dua periode berturut-turut bupati yang terpilih adalah berlatarbelakang partai yang sama yaitu PDIP, memang di Kabupaten Purworejo sendiri partai tersebut lebih memiliki banyak anggota dan lebih unggul daripada partai yang lain. Sebelum dipaparkan kondisi melek politik warga di Kabupaten Purworejo, perlu dijelaskan apa sesungguhnya yang menjadi pengertian melek politik, terutama jika dikorelasikan dengan konteks ke-Indonesiaan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa melek politik itu sendiri merupakan

bagian dari bertumbuh kembangnya kehidupan demokrasi. Bertumbuh kembang atau tidaknya baik atau tidaknya dan hidup atau tidaknya demokrasi di suatu negara bisa diukur dari tingkat melek politik warganya.

Negara-negara yang sudah menerapkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu identik dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) sebagai wadah pengejawantahan kedaulatan rakyat, dan bahkan dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Negara yang mempunyai kecenderungan menganut paham demokrasi konstitusional menempatkan pemilu sebagai proses yang bertujuan agar kehendak rakyat dapat diwujudkan ke dalam sebuah pola kekuasaan tanpa menggunakan kekerasan. Proses Pemilu tidak hanya akan dinilai dengan berpatokan kepada kerangka hukum yang ada melainkan undang-undang, tata tertib penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaannya pun perlu kiranya diuji dan disesuaikan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah undang-undang, tata tertib yang ada telah sesuai dengan tujuan utamanya penyelenggaraan Pemilu atau tidak. Tentu saja dalam penyesuaian tersebut jangan sampai mengabaikan faktor lainnya, seperti hak-hak yang dimiliki oleh tiap-tiap individu maupun kelompok, yang harus masuk keseluruhannya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Secara ideal, tujuan penyelenggaraan pemilu ialah untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>45</sup> Dari empat tujuan tersebut kita dapat melihat bahwa bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemilihan umum bukan terletak pada penyelenggarannya, akan tetapi bagaimana pemilu itu kemudian dapat menjadi proses pembentukan suatu negara yang mandiri dan berdaulat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemilu harus didukung dengan kesadaran politik warga negara atau yang sering disebut —melek politik.

Tanpa didukung warga negara yang melek politik, tujuan dan cita-cita ideal pemilu sulit terwujud. Secara harfiah, melek diartikan sama dengan melihat. Dengan melihat, kita akan tahu apa yang dilihat atau terlihat. Jika tahu dengan yang dilihat, maka kita akan tahu bagaimana mesti bertindak atau bersikap. Sementara politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya tidak semua.

## **B. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**

### **1. Pengertian PKK**

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 bahwa:

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan wadah membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera yang mandiri dengan meningkatkan mental spiritual perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila. Dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan berbagai upaya atau usaha dan kegiatan, seperti meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. Dalam melakukan kegiatan tersebut perlu adanya pengelolaan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan



program-program, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Dengan adanya kegiatan PKK diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan keluarga pada umumnya yang berpedoman pada pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK. Selain memiliki program-program pokok, PKK juga memiliki panca dharma PKK. Isi dari panca dharma ini tentang peranan-peranan wanita dalam kehidupan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wanita sebagai pendamping suami
- 2) Wanita sebagai pengelola rumah tangga
- 3) Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak
- 4) Wanita sebagai pencari nafkah tambahan
- 5) Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat

## 2. Visi dan Misi PKK

### 1) Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

### 2) Misi

- a) Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM),

demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.

- b) Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, ikut mengupayakan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.
- d) Meningkatkan derajat kesehatan kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- e) Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK, baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

### 3. Tujuan PKK

#### 1) Tujuan Umum

Dalam kurun waktu ke waktu akan mendorong peningkatan kemandirian gerakan PKK dalam keluarga dan masyarakat di lingkungannya melalui pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK.

## 2) Tujuan Khusus

Dalam kurun waktu yang relatif pendek akan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK yang merata di semua jenjang, serta meningkatkan mutu pengorganisasian Gerakan PKK dan kapasitas Gerakan PKK baik di desa dan maupun di kota dengan kader-kader yang handal dan berkualitas, serta meningkatkan kemitraan dalam pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 4. Prinsip Dasar PKK

Dalam menyusun suatu rencana kerja atau kegiatan perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar antara lain:

- 1) Adanya sejumlah kekuatan yang dimiliki atau kekuatan yang mendukung, baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap upaya atau kegiatan yang akan dilakukan.
- 2) Adanya berbagai kelemahan yang dihadapi dan yang secara nyata berpengaruh terhadap proses kegiatan yang akan dilakukan.
- 3) Adanya beberapa peluang atau kondisi yang memungkinkan sehingga dapat didayagunakan atau dimanfaatkan untuk memperlancar tujuan yang akan dicapai.

- 4) Adanya ancaman yang diperkirakan dapat berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian tujuan kegiatan yang dilakukan.

PKK dapat menyusun suatu rencana kerja secara baik, tepat guna, tepat sarana dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi maupun potensi yang dimiliki khususnya di Kelurahan Dopleng

#### 5. Program Kerja Kelompok PKK

1. Pokja I mengelola program:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong royong

2. Pokja II mengelola program:

1. Pendidikan dan Ketrampilan
2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

3. Pokja III mengelola program:

1. Pangan
2. Sandang
3. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

4. Pokja IV mengelola program:

1. Kesehatan
2. Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Perencanaan Sehat

## 5. Program Pokok PKK

Program PKK pada disesuaikan dengan Pedoman Umum baru Tim Penggerak PKK di dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK, telah melakukan pembenahan-pembenahan kesekretariatan dan pembinaan langsung ke setiap Kecamatan dan Kelurahan. Adapun program PKK yang harus diperhatikan yaitu:

### 1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Dalam pelaksanaan menumbuhkan kesadaran berkeluarga dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dengan sosialisasi melalui penyuluhan, pelatihan dan simulasi terpadu.

### 2) Gotong Royong

Dalam pelaksanaan gotong royong perlu membangun kerja sama yang baik antarsesama keluarga, warga dan kelompok dalam rangka mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan.

### 3) Pangan

Mempelajari cara pengolahan akan kebutuhan makanan keluarga sebagai faktor penting untuk pertumbuhan dan kesehatan individu di dalam kesejahteraan keluarga. Makanan keluarga harus cukup seimbang, mengandung kalori yang sesuai dengan keperluan setiap individu sehingga cukup protein,

vitamin dan mineral, menarik dan sedap sesuai selera dan keuangan keluarga

#### 4) Sandang

Cara pengelolaan kebutuhan keluarga sebagai kebutuhan hidup yang mempunyai pengaruh terhadap individu baik jasmani, rohani dan sosial. Dan membudayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai produksi dalam negeri.

#### 5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Perumahan sebagai kebutuhan hidup yang pokok disamping sandang dan pangan. Perumahan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, sehingga perlu diusahakan agar fungsi rumah sebagai tempat tinggal menjadi nyaman dan layak untuk ditinggali. Meningkatkan permasyarakatan tentang perumahan sehat dan layak huni serta menumbuhkembangkan kesadaran akan bahaya bertempat tinggal di daerah perbukitan dan menumbuhkan kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah dan tanah.

#### 6) Pendidikan dan Keterampilan

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal dan

pentingnya PAUD melalui pelatihan BKB atau Bina Keluarga Balita dan penyuluhan orientasi PAUD. Melakukan penyuluhan dan menggerakkan keluarga tentang wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun (Wajib Dikdas 12 tahun).

7) Kesehatan

Memelihara kesehatan individu maupun keluarga dan lingkungannya, baik jasmani, rohani dan sosial mencakup pendidikan kesehatan pribadi dan keluarganya, kebersihan lingkungan, sumber air minum yang sehat, pembuangan limbah dan pelestarian lingkungan hidup. Dan upaya perbaikan gizi keluarga, kepedulian keluarga terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pola makan sehat dan bergizi seimbang.

8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Memotivasi keluarga agar mau menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Keuangan keluarga secara rasional, efektif dan efisien berdasarkan penghasilan keluarga yang dihubungkan dengan pendapatan dan pengeluaran dengan melaksanakan cara hidup sederhana dan sehat.

9) Kelestarian Lingkungan Hidup

Kebiasaan membuang sampah di tempat yang benar, cuci tangan dengan sabun setelah buang air kecil/besar dan sebelum

makan, minum serta dalam mengolah makanan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan kebersihan perorangan dan melakukan program sejuta pohon sebagai paru-paru lingkungan perumahan.

#### 10) Perencanaan Sehat

Pentingnya suatu perencanaan untuk masa depan kehidupan dan penghidupan keluarga dengan mempertimbangkan bakat, kondisi dan kesanggupan dari masing-masing keluarga sehingga dapat mencapai keluarga sejahtera dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan kesertaan dalam program keluarga berencana menuju keluarga berkualitas.

Kesepuluh pokok program PKK ini saling berhubungan, saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang mendasarkan pada kesejahteraan keluarga, meliputi sandang, pangan, perumahan, keuangan/berkoperasi, kesehatan dan keamanan. Untuk itu segala sumber yang ada dalam keluarga harus ditatalaksanakan yang berarti segala aktivitas keluarga direncanakan terlebih dahulu. Pelaksanaan tatalaksana untuk



mencapai tujuan yang diinginkan harus bekerja sama antar anggota keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga perlu adanya penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong dengan cara memberikan pendidikan dan ketrampilan bagi keluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PKK merupakan organisasi yang menjadi wadah dalam membina keluarga bermasyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.

## 6. Sejarah PKK

PKK merupakan organisasi perempuan di akar rumput, yang dibentuk sejak zaman Orde Baru, tepatnya pada tahun 1961. Semula, pada awal dibentuknya, PKK merupakan singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. “Pembinaan” adalah bahasa politik khas Orde Baru untuk menyatakan pengarahan dan pengontrolan, dilandasi dengan kepentingan ketahanan nasional untuk mengamankan pembangunan. Kesejahteraan keluarga menjadi sasaran pembinaan, karena menurut Kardinah Soepardjo-Rustam, “Dalam keluargalah bibit awal manusia

ditanam, dipelihara, tumbuh, dan berkembang.” Tugas para ibu PKK adalah membentuk keluarga dengan manusia berkualitas, demi keberhasilan pembangunan.

Perwujudan keluarga Orde Baru ini harus sesuai dengan Trilogi Pembangunan, yang meliputi stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Ketika memasuki era Reformasi dan adanya paradigma baru pembangunan, serta Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tim Penggerak PKK Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa (Rakernaslub) PKK. Rakernaslub dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November 2000 di Bandung, yang menghasilkan beberapa pokok kesepakatan. Hasil Kesepakatan Rakernaslub PKK tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Hal ini sesuai dengan perubahan nama Kementerian Urusan Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) yaitu, pada saat Khofifah Indar Parawansa memimpin kementerian perempuan. Perubahan nama PKK ini menggambarkan seakan ada political will dan harapan baru dari paradigma perjuangan perempuan sebagai mitra kerja

pemerintah. Paradigma yang lebih berperspektif gender dan memahami isu kepentingan perempuan.

Dari sejarahnya, gerakan PKK yang secara kelembagaan menjadi mitra pemerintah ini, bertujuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak perempuan sebagai warga negara. Sejak kelahirannya pada tahun 1961, PKK senantiasa dihadapkan pada tantangan dan masalah sesuai zamannya. PKK terdiri dari ibu-ibu isteri pejabat dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Sebagai bentukan negara, PKK tidak otonom dari politik kekuasaan negara.

Di masa Orde Baru, PKK sering dijadikan alat politik kekuasaan dari kekuatan politik tertentu/Golkar. Pada masa reformasi, PKK dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam kampanye pemilu dan pemilukada oleh beragam kekuatan politik. Oleh sebagian kalangan, PKK sering dikritik sebagai organisasi yang tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap isu gender, apalagi perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Sejak awal berdirinya, PKK memang dirancang oleh rezim Orde Baru untuk mendukung program pembangunan pemerintah, mulai dari tingkat dusun, lewat sepuluh program utama yang kemudian dikenal sebagai Dasa Wisma. Dalam konteks pelaksanaan Dasa Wisma, telah banyak capaian signifikan dari kerja-kerja PKK yang diakui. Program Dasa Wisma saat ini juga masih

sama. Tetapi kini muncul permasalahan yang pada 40 tahun lalu belum dianggap sebagai isu strategis, yang menjadi fenomena serius, seperti: trafficking/perdagangan orang (terutama perempuan dan anak), pekerja migran, HIV/AIDS, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta berbagai kekerasan berbasis gender. Isu-isu yang terus berkembang tersebut menjadi tantangan bagi PKK, dan PKK harus dapat meresponnya serta bersinergi dengan organisasi perempuan lainnya.

### **C. Kelurahan Doplang**

Kelurahan Doplang adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Luas Kelurahan ini adalah 145 H, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Sindurjan, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Pangenjuritengah, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kledung Karangdalem dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Pangenjuritengah. Jumlah penduduk di Kelurahan Doplang yaitu 3.350 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.599 jiwa dan perempuan sebanyak 1.751 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga yaitu 805 KK

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	3.157
2	Kristen	93
3	Katholik	100
4	Hindu	-
5	Budha	-

Di Kelurahan ini terdapat tiga agama yang berkembang yaitu Islam, Kristen, Katholik dengan jumlah orang yang beragama Islam adalah 3.157 orang, agama Kristen 93 orang dan agama Katholik sebanyak 100 orang sedangkan agama Hindu dan Budha tidak ada.

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	99
2	Sekolah Dasar	635
3	Sekolah Menengah Pertama	597
4	Sekolah Menengah Atas	1.009
5	Akademi (D1-D3)	-
6	Sarjana	410

Selain menurut agama nya, dilihat menurut tingkat pendidikan terdapat 99 orang berpendidikan taman kanak-kanak, 635 orang berpendidikan Sekolah Dasar, 597 orang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 1.009 orang

berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sarjana sebanyak 410 orang. Di Kelurahan ini terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan seperti pengajian, rebana, dan juga PKK, tetapi dari ketiga organisasi yang ada, PKK adalah organisasi yang paling aktif dan berkembang di Kelurahan Dopleng ini, dibuktikan dengan PKK Kelurahan Dopleng ini pernah menjadi Kelurahan juara 3 di lomba yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPERMADES) Provinsi Jawa Tengah dengan mengalahkan hamper 8.576 Desa atau Kelurahan se-Provinsi Jawa Tengah, lomba ini terkait dengan penilaian administrasi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan masyarakat.

STRUKTUR PENGURUS TIM PENGGERAK PKK  
KELURAHAN DOPLANG  
KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO

